

ABSTRAK

PUTI NILAM SURI (2009/97310) : Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Padang dan kendala yang terjadi serta upaya mengatasi kendala tersebut. Fungsi DPRD Kota Padang salah satunya adalah fungsi legislasi, yaitu peranan DPRD dalam pembangunan dan mengusahakan kebijakan. DPRD Kota Padang menjembatani pemerintah dengan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dan kendala apa saja yang terjadi dalam melaksanakan fungsi legislasi serta bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi secara langsung serta dokumentasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data dalam bentuk uraian deskriptif dengan kalimat yang jelas dan dapat dimengerti sesuai dengan tujuan penelitian metode kualitatif.

DPRD Kota Padang adalah merupakan DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, yaitu pemilihan umum yang diikuti oleh 35 partai politik. Kedudukan DPRD Kota Padang periode 2009-2014 merupakan Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Padang cukup baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. DPRD Kota Padang juga melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan atau pembuatan Ranperda, yang dilakukan dengan cara anggota DPRD terjun langsung kelapangan dengan mewawancarai masyarakat. Kendala yang ditemui dalam pengusulan Ranperda yang berasal dari pihak legislatif, disebabkan kendala internal yaitu: kapasitas, latar belakang dan kemauan DPRD Kota Padang, sedangkan kendala eksternal yaitu budaya politik dan pengaruh kekuatan politik di DPRD Kota Padang. Dalam mengatasi kendala yang ditemui, pemerintah daerah dan DPRD Kota Padang mengadakan upaya peningkatan sumber daya manusia, pelatihan dan studi banding, dengan demikian untuk dapat melaksanakan fungsi legislasi yang baik, melalui lahirnya kebijakan atau peraturan Daerah. Diharapkan nantinya masyarakat ikut dalam pembentukan Perda dan anggota DPRD lebih memiliki kemampuan membuat Perda.